

KONSTRUKSI REALITAS POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM PODCAST BOCOR ALUS POLITIK TEMPO.CO

Helni Sadiyah¹, Dadang S. Anshori², Andoyo Sastromiharjo³

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

helnisadiyah@upi.edu

ABSTRAK: Kemunduran demokrasi dan pelemahan hukum selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi topik hangat yang dibahas media sosial, termasuk dalam *Podcast Bocor Alus Politik* di kanal YouTube *tempodotco*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi realitas politik hukum Indonesia era Jokowi melalui pendekatan penelitian kualitatif analisis konten. Data berupa teks hasil transkrip rekaman video yang dianalisis menggunakan kerangka analisis wacana kritis Teun A. van Dijk (1988), mencakup tiga dimensi wacana: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Sumber data diambil dari video YouTube *Podcast Bocor Alus Politik* episode *Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi: Dinasti Politik dan Warisan Beban untuk Prabowo Subianto*, berdurasi 1 jam 3 menit 52 detik, yang tayang pada 26 Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi teks dalam *podcast* menggunakan gaya bahasa metafora dan retorik untuk menekankan penilaian kritis terhadap kebijakan politik hukum Jokowi, dengan menyoroti penurunan demokrasi dan praktik dinasti politik. Dimensi kognisi sosial merepresentasikan pengetahuan mengenai peran Jokowi sebagai Presiden yang gagal menjalankan demokrasi dan harapan untuk Prabowo memulihkan kembali nilai-nilai demokrasi. Dimensi konteks sosial memperlihatkan peran media massa dalam mempengaruhi opini publik dengan menciptakan ruang diskusi kritis menggunakan media digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut mengenai peran media digital dalam membangun konstruksi realitas sosial di Indonesia, khususnya pada platform media sosial.

KATA KUNCI: *analisis wacana kritis; media youtube; podcast bocor alus politik; politik hukum.*

CONSTRUCTION OF INDONESIAN LEGAL POLICY REALITY IN THE PODCAST BOCOR ALUS POLITIK TEMPO.CO

ABSTRACT: The decline of democracy and the weakening of the law during President Joko Widodo's two terms of government have become hot topics discussed on social media, including in the *Podcast Bocor Alus Politik* on the *tempodotco* YouTube channel. This study aims to determine the construction of the reality of Indonesian legal policy in the Jokowi era through a qualitative content analysis research approach. The data in the form of text from video recording transcripts analyzed using Teun A. van Dijk's (1988) critical discourse analysis framework, covering three dimensions of discourse: text, social cognition, and social context. The data source was taken from the YouTube video *Podcast Bocor Alus Politik* episode *Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi: Dinasti Politik dan Warisan Beban untuk Prabowo Subianto*, with a duration of 1 hour 3 minutes 52, which aired on August 26, 2024. The results of the study show that the text dimension in the podcast uses metaphorical and rhetorical language styles to emphasize important assessments of Jokowi's political policies, with ties to democracy and political dynasty practices. The social cognition dimension represents knowledge about Jokowi's role as a President who failed to implement democracy and the hope for Prabowo to restore democratic values. The social context dimension shows the role of mass media in influencing public opinion by creating critical discussion spaces using digital media. This study recommends the need for further study on the role of digital media in building social reality construction in Indonesia, especially on social media platforms.

KEYWORDS: *critical discourse analysis; legal policy; podcast bocor alus politik; youtube media.*

Diterima:
2025-01-18

Direvisi:
2025-02-20

Disetujui:
2025-02-24

Dipublikasi:
2025-03-30

Pustaka : Sadiyah, H., Anshori, D. S., & Sastromiharjo, A. (2025). Konstruksi realitas politik hukum Indonesia dalam podcast *Bocor Alus Politik* Tempo.co. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 21(1), halaman 177-193.

PENDAHULUAN

Dinamika politik hukum Indonesia tergambar melalui penggunaan bahasa di media sosial, yang memperlihatkan bagaimana ruang publik digital menjadi arena konstruksi realitas. Munculnya berbagai kosakata dan istilah baru di media sosial tidak hanya menunjukkan cara pandang masyarakat dalam memahami kebijakan politik hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah dikomunikasikan dan diperdebatkan secara luas.

Pasca reformasi, media massa memiliki kebebasan penuh dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan opini terkait pendapat, keinginan, dan keluhan terhadap kebijakan pemerintah melalui siaran televisi, radio, maupun melalui surat kabar (Aridho et al., 2024). Saat ini, pola komunikasi publik telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin masifnya penggunaan media sosial yang memberikan kemudahan bagi siapa pun untuk memproduksi, mengakses dan menyebarkan informasi.

Kondisi tersebut menyebabkan media massa tidak lagi menjadi satu-satunya sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi (Pitaloka, 2024). Pemerintah dapat melakukan kontrol sosial secara langsung melalui platform media sosial maupun dengan memanfaatkan aktor-aktor digital, seperti *buzzer* atau *influecer* untuk membentuk dominasi opini publik sesuai dengan kepentingannya (Sugiono, 2020).

Di sisi lain masyarakat dapat berperan aktif dalam produksi dan distribusi wacana, baik untuk mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Tantangan baru berupa bias interpretasi dan disinformasi menyebabkan polarisasi opini di tengah masyarakat. Media massa dituntut untuk tetap menjalankan

fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi dengan menyediakan informasi yang akurat, berimbang dan menyuarakan suara rakyat dengan menjadi mata publik (*watchdog*) yang mengawasi kekuasaan dalam negara demokrasi (Evanalia, 2022).

Menurut Mahfud MD (2020) Politik hukum (*legal policy*) adalah kebijakan resmi mengenai hukum, mencakup pembentukan, pengawasan, dan pencapaian tujuan negara yang dicitakan melalui reformasi hukum. Politik hukum dapat menentukan arah kebijakan publik dan tata kelola negara melalui lembaga-lembaga negara. Kebijakan reformasi hukum harus selaras dengan kondisi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta landasan hukum negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 (Manan, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi pembentukan undang-undang merupakan bentuk implementasi asas keterbukaan yang memiliki kedudukan penting terutama dalam negara demokrasi untuk menghasilkan produk hukum responsif. Sehingga, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada *prosedural justice*, tetapi juga mengutamakan keadilan dan kepentingan umum (Arkana & Firdaus, 2022). Dalam praktiknya, kebijakan politik hukum masa pemerintahan Jokowi sering kali menyampingkan asas keterbukaan sehingga politik hukum yang seharusnya mewujudkan keadilan sosial bertentangan dengan realitas norma yang dihasilkan. Akibat dari implementasi hukum tersebut, demonstrasi dan ketegangan sosial sering kali terjadi karena kurangnya akomodasi terhadap kepentingan masyarakat luas (Yandi et al., 2024).

Selain itu, penggunaan instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dikritik karena dinilai membatasi

kebebasan berekspresi yang menjadi nilai fundamental dalam negara demokrasi (Pratama et al., 2022). Tujuan utama pengesahan UU ITE adalah memberikan kepastian hukum, melindungi pengguna, serta mendukung perkembangan ekonomi digital. Namun, sejumlah pasal multitafsir, seperti pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2, sering kali digunakan untuk menekan kritik dan pendapat berbeda, sehingga memicu kontroversi di masyarakat dan kalangan aktivis hak asasi manusia.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan bahwa 74,96 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama 10 tahun kepemimpinannya (CNN Indonesia, 2024). Media masa banyak memberitakan berakhirnya masa pemerintahan Jokowi dengan beragam sudut pandang, baik yang mencoba untuk tetap netral maupun yang secara eksplisit mengkritik kebijakan pemerintahannya. Salah satu isu yang menjadi sorotan media adalah evaluasi terhadap sistem demokrasi yang dianggap lemah karena kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum, yang sering kali dianggap didominasi oleh kepentingan elit dan oligarki (Wibowo et al., 2024). Meskipun hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi, fenomena tersebut berbanding terbalik dengan wacana di media sosial yang banyak diwarnai oleh kritik terhadap kebijakannya. Hal ini menciptakan kesenjangan antara persepsi publik yang tercermin dalam survei dan realitas perdebatan di ruang publik digital.

Media massa membangun konstruksi realitas melalui penyajian berita dengan melakukan seleksi dan penekanan terhadap isu tertentu sehingga khalayak hanya mengingat aspek-aspek yang dianggap penting oleh media (Eriyanto, 2005). Pilihan bahasa yang digunakan

dalam pemberitaan dapat merepresentasikan ideologi yang menunjukkan relasi media terhadap struktur sosial dan konteks peristiwa tertentu (Fairclough, 1995). Dalam konteks media digital, wacana yang tersebar di media sosial membentuk konstruksi realitas dengan memperkuat atau menantang dominasi wacana yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan bahasa dalam pemberitaan menjadi penting untuk mengungkap bagaimana media membangun konstruksi realitas serta dampaknya terhadap masyarakat.

Tempo merupakan salah satu pionir portal berita *online* yang menyoroti kebijakan politik hukum Jokowi dengan membuat sebuah Majalah edisi khusus yang membahas 10 tahun Jokowi yang menekankan pada kritik atas pemerintahan Jokowi yang dinilai melemahkan demokrasi dengan menjalankan pemerintahan bercorak *legalisme otokratis* (Tempo.co, 2024). Media yang didirikan pada tahun 1995 ini terus berinovasi dalam menyajikan informasi, selain menyajikan informasi dalam bentuk laporan tertulis, kini Tempo.co menghadirkan inovasi baru dengan menyajikan berita ke dalam berbagai platform. Salah satunya adalah platform berbentuk audio-visual yang disiarkan di kanal YouTube *tempodotco*, melalui program *Podcast Bocor Alus Politik*. *Podcast* ini berfungsi sebagai wadah untuk membahas laporan yang telah diterbitkan atau akan dimuat dalam majalah *Tempo* yang terbit setiap akhir pekan dengan mengangkat sudut pandang beragam dari narasumber seperti pengamat politik, aktivis, dan akademisi dengan menyajikan diskusi mendalam mengenai isu politik dan hukum di Indonesia yang dapat diakses oleh publik secara luas (Susanto, 2023).

Analisis bahasa terhadap konstruksi realitas politik hukum dapat dilakukan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang tidak hanya berfokus pada komponen tekstual tetapi juga mempertimbangkan komponen kontekstual yang mempengaruhi pembentukan wacana (Eriyanto, 2005). Konstruksi realitas politik hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk yang mencakup teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Model analisis wacana kritis Teun A. van Dijk menekankan bahwa wacana yang terbentuk di media massa telah melalui proses sosiokognitif, yaitu proses produksi dan konsumsi wacana yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, budaya, dan kondisi sosial yang mempengaruhi pembentukan wacana di media massa (Van Dijk, 2014).

Melalui program *Podcast Bocor Alus Politik, Tempo* menunjukkan bagaimana media massa beradaptasi dalam era digital untuk mempertahankan pengaruhnya dalam membentuk opini publik. Konstruksi realitas yang disajikan tak lagi melalui pemberitaan dalam format teks, ataupun cetak, tetapi juga melalui percakapan, dialog lisan, dan performa dalam media audio-visual. Sehingga, konstruksi yang dihasilkan lebih mudah dijangkau oleh publik secara luas dan memungkinkan terjadinya negosiasi makna antara narasumber, pembawa acara, dan pendengar daring.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana *Tempo*, melalui kanal YouTube *tempodotco* dalam program *Podcast Bocor Alus Politik* membentuk konstruksi realitas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk (1998). Model pendekatan ini dipilih

berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap konstruksi realitas media yang dibangun melalui narasi-narasi media. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks secara struktural, tetapi juga dengan mempertimbangkan kognisi, dan konteks sosial yang turut andil dalam proses produksi wacana.

Pengungkapan konstruksi realitas media juga dapat mengungkap bagaimana media mengambil posisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah cenderung memiliki keberpihakan terhadap kekuasaan atau mbingkainya secara kritis. Posisi tersebut menjadi indikator ideologi media dan strategi hegemonik dalam mempengaruhi kesadaran publik. Penelitian ini berkontribusi pada kajian media dan wacana dengan membuka ruang refleksi kritis terhadap praktik demokrasi dan penegakkan hukum di Indonesia dalam momentum pergantian kepemimpinan, di mana arah kebijakan hukum dan politik akan sangat menentukan masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai konstruksi realitas di media massa. Asnan (2018) meneliti konstruksi realitas politik dalam pemberitaan media daring *Metrotvnews.com* terhadap seorang tokoh politik dengan menggunakan analisis *framing*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media daring dapat mempengaruhi cara publik memandang seorang tokoh politik. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengambil objek kajian pada media YouTube, yang menyajikan pola komunikasi yang lebih interaktif dengan memanfaatkan fitur audio-visual. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pola komunikasi dan propaganda media dalam melawan dominasi opini publik di media sosial.

Penelitian serupa yang kedua dilakukan oleh Kurniansyah & Siregar (2023) dengan menggunakan pendekatan yang sama yaitu analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk untuk meneliti konstruksi realitas melalui tayangan *podcast* kanal YouTube Najwa Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam kanal tersebut merepresentasikan konstruksi realitas pengaruh keputusan hakim terhadap demokrasi Indonesia saat Pemilu 2024. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan fokus utama pada strategi bahasa dalam mengonstruksi realitas politik hukum Indonesia dalam *Podcast Bocor Alus Politik* di kanal YouTube *Tempo.co*.

Penelitian ketiga dengan topik yang serupa terkait hubungan politik hukum dan media digital dilakukan oleh Noak (2023), yang meneliti peran lembaga partai politik dalam membangun demokrasi melalui pemanfaatan media digital. Meskipun meneliti topik yang sama, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena menggunakan pendekatan kajian hukum normatif, sementara penelitian ini menggunakan kajian bahasa analisis wacana kritis untuk mengetahui konstruksi realitas politik hukum Indonesia.

Selanjutnya, penelitian mengenai kritik media *Tempo* terhadap kebijakan Pemerintah Joko Widodo selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) telah dilakukan oleh Aisyah et al. (2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tempo* membangun konstruksi kritis melalui *Majalah Nawadosa Jokowi*, dengan menggunakan pola kritik yang konsisten dan terstruktur dengan membingkai 18 isu besar selama dua periode pemerintahan Jokowi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji

penggunaan bahasa dalam produksi wacana di media sosial YouTube dalam format dialog interaktif.

Penelitian serupa yang terakhir dengan objek yang hampir dekat dilakukan oleh Rahman & Nurhadi (2024) yang menganalisis konstruksi isu dinasti politik Jokowi dalam program *Opini Tempo* dalam tayangan YouTube *tempodotco*. Hasil analisis menunjukkan bahwa media *Tempo* dalam tayangan tersebut mengonstruksi opini publik dengan penggunaan bahasa yang cenderung mengedepankan ideologi oposisinya untuk mengkritik pelemahan demokrasi akibat dari adanya dinasti politik Jokowi. Penelitian ini memiliki objek yang berbeda dengan memilih program *Podcast Bocor Alus Politik* sebagai objek kajian.

Namun, kajian bahasa mengenai konstruksi realitas politik hukum dalam media digital, khususnya melalui platform YouTube sebagai media baru dalam bidang *broadcasting* masih terbatas. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis bagaimana *Tempo.co* melalui *Podcast Bocor Alus Politik* di kanal YouTube *Tempodotco* mengonstruksi realitas politik hukum Indonesia menggunakan analisis wacana kritis (AWK) model van Dijk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi realitas politik hukum Indonesia yang direpresentasikan oleh media massa dalam penayangan *Podcast Bocor Alus Politik* yang membahas mengenai masa pemerintah Jokowi di kanal YouTube *tempodotco*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan, mengingat penggunaan bahasa dalam media digital dapat membentuk opini publik mengenai sebuah fenomena sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif untuk mengungkap makna dan nilai di balik teks (Krippendorff, 2018). Analisis data penelitian menggunakan model analisis wacana kritis Teun A. van Dijk menekankan pada struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Sumber data penelitian diambil dari video *Podcast Bocor Alus Politik* di kanal YouTube *Tempodotco* yang tayang pada 26 Agustus 2024 dengan tajuk “*Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi: Dinasti Politik dan Warisan Beban untuk Prabowo*”. Tayangan video tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis bagaimana media massa, melalui platform YouTube mengonstruksi kebijakan politik hukum Presiden Jokowi melalui bahasa yang digunakan oleh pembawa acara dan narasumber dalam *podcast*. Konten video yang dipilih merupakan ulasan dari Majalah Tempo *Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi* yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2024, yang membahas mengenai kebijakan politik hukum di Indonesia dari sudut pandang Rocky Gerung sebagai kritikus dan pengamat politik Indonesia (Tempodotco, 2024).

Data analisis penelitian ini berupa teks hasil transkrip video, yaitu tuturan yang diucapkan oleh pembawa acara dan narasumber *podcast*. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara menyimak secara berulang dan mencatat bagian-bagian video relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, data pendukung seperti artikel berita, jurnal dan buku terkait politik hukum juga dikumpulkan untuk memperkaya analisis dan pengetahuan lebih dalam mengenai politik hukum dalam *podcast*.

Setelah data dikumpulkan dan direduksi kemudian dianalisis

menggunakan model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk dengan mempertimbangkan tiga dimensi wacana yaitu (1) Dimensi teks, menganalisis bagaimana tuturan dalam video *podcast* dibentuk secara struktural, (2) Kognisi sosial, menganalisis bagaimana individu dalam *podcast* (pembawa acara dan narasumber) memahami dan menginterpretasikan isu politik hukum yang dibahas, dan (3) konteks sosial, menganalisis bagaimana wacana dibangun oleh pembawa acara dan narasumber mencerminkan kondisi politik hukum di Indonesia (Jayanti & Pribadi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan analisis konstruksi realitas politik hukum dalam wacana yang terbentuk dari konten video *Podcast Bocor Alus Politik* berjudul *Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi: Dinasti Politik dan Warisan Beban untuk Prabowo Subianto* dapat diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Teks

Dalam analisis wacana van Dijk, sebuah teks terdiri dari tiga tingkatan yang saling berkaitan: struktur makro, struktur atas, dan struktur mikro, sebagai berikut.

Struktur Makro (Tematik)

Struktur makro merujuk pada makna global dari suatu wacana, yang mencakup elemen tematik yang dapat diidentifikasi melalui topik yang menjadi fokus pembahasan. Topik yang menjadi pembahasan utama dalam *Podcast Bocor Alus Politik* episode ini mengusung tema *Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi: Dinasti Politik dan Warisan Beban untuk Prabowo*. Topik yang diambil berkaitan dengan peristiwa transisi peralihan kepemimpinan dari Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran yang telah memenangkan kontestasi pemilihan presiden 2024. Wacana media banyak

menyoroti evaluasi kebijakan Jokowi selama satu dekade kepemimpinannya. Berikut merupakan kutipan yang menggambarkan keseluruhan tema dalam wacana video *podcast*.

Data (1), menit 02:58-03:43

“Oke Bang kami kan sudah nyiapin ya, edisi khusus 10 tahun Jokowi ya, terutama soal politik dan hukum gitu ya lu sendiri nih 10 tahun pemerintahan Jokowi, lu kan sebagai biang rusuh ya kan di negara ini setidaknya lu menjadi musuhnya istana lah tapi nyatanya omongan lu banyak benarnya juga nih atau hampir semuanya benar gitu ya, soal kritik-kritik lu terhadap Jokowi begitu nah lu sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi skala 1 sampai 10?” (Stefanus Pramono).

“1 sampai 10? Kenapa enggak pakai angka gitu? pakai angka aja Dek ya” (Rocky Gerung).

“Pakai angka boleh” (Stefanus Pramono)

“A minus, a minus a minus!” (Rocky Gerung).

“Kenapa?” (Husein Abri)

“A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran!” (Rocky Gerung).

Pada kutipan pernyataan tersebut, tema politik hukum menjadi kerangka utama diskusi. Melalui pertanyaan yang diberikan, secara persuasif telah memantik narasumber untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan yang dicanangkan era kepemimpinan Jokowi sebagai pemerintahan yang penuh dengan kejahatan dan kurang dalam transparansi atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum.

Suprastruktur (Skematik)

Suprastruktur merupakan kerangka wacana berupa struktur atau alur wacana yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Struktur atau alur dalam tayangan video *podcast* dapat diurutkan dengan memperhatikan beberapa segmen sebagai berikut.

Pada bagian pendahuluan, terdapat di segmen pertama, kedua dan ketiga. Segmen pertama diawali dengan penayangan kilas balik pernyataan Rocky

Gerung terhadap kepemimpinan Jokowi yang narasumber disebut sebagai “puncak kejahatan” di era reformasi dan Jokowi mewariskan “sampah politik” kepada Prabowo yang akan membebani pemerintahannya. Segmen kedua terdapat penayangan visual grafis sebagai pembuka video *podcast* dan ilustrasi Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi. Pada segmen ini juga ditampilkan sebuah teks yang memberikan keterangan mengenai upaya Tim Bocor Alus Politik yang telah mengirimkan daftar pertanyaan kepada Presiden Jokowi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Koordinator staf ahli presiden, Ari Dwipayana, namun tidak mendapatkan respons. Pada Rabu, 24 Juli 2024, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menerima wawancara *Tempo* mengenai sepuluh tahun pemerintah Jokowi dengan memberikan hasil survei kepuasan publik. Segmen ketiga kemudian pembawa acara memperkenalkan diri dan memperkenalkan peserta diskusi yaitu Mahasiswa Trisakti serta menyampaikan tujuan diskusi yaitu untuk mengulas *Majalah Tempo* mengenai sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, dengan membahas kebijakan politik, hukum, ekonomi dan lingkungan. Pembawa acara juga memperkenalkan narasumber, yaitu Rocky Gerung.

Bagian isi, terdapat di segmen keempat. Diskusi yang fokus pada pembahasan-pembahasan mendalam yang secara berurutan meliputi: 1) Penilaian terhadap kebijakan politik hukum Jokowi, 2) Pembahasan mengenai dinasti politik dan manipulasi survei publik, 3) Harapan pada Prabowo, 4) Kritik terhadap demokrasi. Kemudian pada bagian penutup, diskusi diakhiri dengan refleksi bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal dan mengkhianati reformasi. Rocky menegaskan bahwa perubahan dapat terjadi jika Prabowo mampu menjunjung

tinggi nilai-nilai demokrasi dengan menghapus semua kebijakan politik hukum era Jokowi yang mengesampingkan nilai-nilai demokrasi seperti pasal-pasal bermasalah dalam UU Omnibus Law, memperbaiki KPK, dan UU ITE.

Struktur Mikro

Analisis struktur mikro mengungkap makna yang ditekankan dalam wacana, dengan fokus pada elemen semantik, sintaksis, stilistika, dan retorika.

Semantik

1) Latar

Latar adalah elemen yang berperan dalam mempengaruhi semantik (makna) yang ingin disampaikan. Pemilihan latar pada *podcast* terlihat dari pernyataan pembawa acara yang hadir untuk mengulas edisi khusus majalah *Tempo* mengani sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, hal ini terlihat dalam kutipan dialog berikut.

Data (2), menit 2:59-3:28

“Oke bang kami kan sudah nyiapin ya, edisi khusus 10 tahun Jokowi ya terutama soal politik dan hukum gitu ya. Lu sendiri nih 10 tahun pemerintahan Jokowi lu kan sebagai biang rusuh ya kan di negara ini setidaknya lu menjadi musuhnya istana lah tapi nyatanya omongan lu banyak benarnya juga nih atau hampir semuanya benar gitu ya soal kritik-kritik lu terhadap Jokowi begitu. Nah, lu sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi skala satu sampai sepuluh?” (Stefanus Pramono)

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana pembawa acara mengarahkan narasumber untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Pernyataan tersebut mempengaruhi narasumber untuk memberikan penekanan pada penilaian dan kritik terhadap kebijakan politik hukum yang diambil selama dua periode pemerintahan Jokowi.

2) Detail

Detail adalah strategi yang digunakan untuk mengendalikan informasi dengan menguraikan detail yang ingin disampaikan secara gamblang dengan meminimalkan detail yang tidak menguntungkan. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan sisi tertentu dalam wacana. Elemen detail dalam *podcast* terlihat melalui kutipan berikut.

Data (3), menit 04:5-05:21

“Kita mau lihat ini nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh dan kelihatannya asetnya memang enggak ada itu. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tu saya sebutnya kejahatan karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu dan itu yang menyebabkan defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebetulnya di situ kan. Nah kalau kita mau mengatakan bahwa Jokowi ada prestasi ya mungkin dia prestasi yang mungkin dia prestasi yang tidak dia janjikan, IKN enggak dia janjikan, kereta cepat enggak dia janjikan, bahkan yang dia janjikan saja enggak dipenuhi, justru dia mau ambil legacy dari yang enggak dia janjikan itu, dan itu juga gagal kan itu aj, ya kejujurannya mesti kita sebutin di situ itu bahwa beban Pak Prabowo bukan sekedar menentukan arah ekonomi tapi mengikat kembali demokrasi itu dan itu hal yang hanya bisa dibuat atau direkayasa ulang kalau Prabowo betul-betul ingin menghidupkan *the supremacy of civilian values ...*” (Rocky Gerung).

Kutipan pernyataan narasumber di atas merupakan detail yang diuraikan dalam *podcast* meliputi pembahasan mengenai kebijakan politik hukum pada masa pemerintah Jokowi yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Detail tersebut menonjolkan bahwa pemerintahan

Jokowi meninggalkan beban untuk pemerintahan selanjutnya.

3) Maksud

Elemen maksud dalam wacana merupakan upaya untuk menonjolkan sudut pandang tertentu sebagai kebenaran utama dengan mengesampingkan kebenaran lain. Elemen maksud dalam *podcast* terlihat dalam kutipan dialog berikut.

Data (4), menit 02:35-02:50

“Emang Jokowi jahat ya Bang ya?” (Stefanus Pramono)

“Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan, gua ucapin Itu secara serius ya.” (Rocky Gerung).

Kutipan dialog di atas secara eksplisit menonjolkan bahwa pemerintahan Jokowi telah melakukan kejahatan dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan lain di era reformasi. Pernyataan tersebut secara tidak langsung mendukung gagasan utama narasumber bahwa pemerintahan Jokowi merupakan simbol dari puncak kegagalan dan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi.

4) Praanggapan

Elemen praanggapan merupakan elemen yang digunakan untuk mendukung makna melalui pernyataan yang diasumsikan tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Elemen praanggapan dapat dilihat melalui kutipan berikut.

Data (5), menit 14:15-14:43

“Dari yang lu sudah jelaskan tadi, sepertinya Jokowi ini buat lu enggak punya Legacy positif apapun? (Stefanus Pramono).

“Iya gua berupaya untuk nyari positif, yang gua ketemu negatif semua bagaimana gimana caranya gitu aku berupaya gitu untuk memberitahu, setiap kali orang tanya tuh kan

kalau orang bertanya gua pikir, kalian yang cemaskan, kenapa gua yang mesti jawab? legacy apa ya enggak ada. Demi Tuhan tuh enggak ada.” (Rocky Gerung).

Kutipan pertanyaan pembawa acara dan pernyataan narasumber di atas mempertegas maksud utama wacana dengan menekankan anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak memiliki warisan positif yang dapat dibanggakan. Narasumber mengasumsikan secara eksplisit dengan pernyataan bahwa setiap upaya untuk menemukan sisi positif dari pemerintahan Jokowi justru menunjukkan banyak sisi negatifnya.

Sintaksis

1) Bentuk Kalimat

Dilihat dari bentuk susunan argumen yang dituturkan narasumber, *podcast* ini didominasi oleh penggunaan bentuk pernyataan kalimat deduktif. Narasumber menyampaikan pernyataan umum terlebih dahulu yang kemudian diperkuat dengan pernyataan spesifik untuk menciptakan dampak retorik yang kuat. Di sisi lain, kalimat induktif juga digunakan untuk membangun argumen berbasis data sebelum menarik kesimpulan umum. Penggunaan kalimat deduktif dapat dilihat melalui kutipan berikut.

Data (6), menit 02:39-02:47

“Bahkan kejahatan, seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi, karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan.” (Rocky Gerung).

Kalimat pernyataan narasumber tersebut menggunakan kalimat deduktif untuk menegaskan pandangan yang kritis terhadap Jokowi dengan penggunaan pernyataan retorik yang kuat. Penggunaan kalimat tersebut memperkuat citra narasumber sebagai seorang tokoh oposisi. Selain penggunaan pernyataan bentuk

kalimat deduktif, narasumber menggunakan kalimat induktif untuk membangun argumen yang diawali dengan data atau contoh spesifik, seperti penilaian terhadap proyek pembangunan yang berujung pada kritik yang menyeluruh. Pola kalimat induktif dapat dilihat melalui kutipan berikut.

Data (7), menit 04:46-04:56

“IKN tidak dijanjikan, kereta cepat tidak dijanjikan, bahkan yang dijanjikan saja tidak dipenuhi. Jadi, Jokowi mengambil legacy dari yang tidak dia janjikan dan itu juga gagal.” (Rocky Gerung).

Kutipan pernyataan narasumber di atas menguraikan fakta-fakta spesifik (khusus) untuk menyimpulkan bahwa Jokowi gagal dalam memenuhi janji politiknya. Kalimat ini dapat membantu publik melihat argumen yang dibangun dari data dan meningkatkan kesan objektivitas.

Data (8), menit 07:19-07:46

“Jadi itu kondisi kita, dipukau oleh lembaga survei, elektabilitasnya 82% tapi kita gak ngerti apa yang terjadi dibalik lembaga survei itu, kalo kita lihat bahkan semua hal, semua jurnalis yang paling kecil pun tahu kejahatan Jokowi, netizen itu caci maki, jadi seolah-olah ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia. Gue lebih percaya pada batin.” (Rocky Gerung).

Kutipan narasumber tersebut menyoroti kontradiksi antara fakta-fakta survei kepuasan publik dan respons netizen digunakan untuk menyimpulkan ketidaksesuaian antara klaim survei dan realitas sosial yang menyoroti kontradiksi secara logis sehingga publik dapat menarik kesimpulan yang sama.

2) Koherensi

Koherensi merupakan penghubung antar kata atau kalimat yang saling bertautan dalam suatu teks atau wacana. Elemen koherensi dalam tuturan *podcast* dapat diamati melalui hubungan logis antar segmen diskusi, pertanyaan pembawa acara, pengulangan kata kunci, dan kesinambungan topik yang memperkuat argumen. Tema atau topik utama yaitu kritik terhadap 10 tahun pemerintahan Jokowi semua kebijakan politik hukum dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia menjadi tema atau topik utama yang dikembangkan dalam bagian-bagian diskusi.

Data (9), menit 04:00-04:56

“Kita mau lihat nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo berapa banyak laibility yang mesti diperbaiki Prabowo tu, dan kelihatannya, asetnya emang ga ada, jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tu, saya sebutnya kejahatan, karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti, itu yang menyebabkan, defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tu, ketegangan sosial naik terus segala macam hal di situ kan. Nah, kalo kita mengatakan bahwa Jokowi ada prestasi, ya mungkin dia prestasi yang, hal yang tidak dia janjikan, IKN tidak dijanjikan, kereta cepat tidak dijanjikan, bahkan yang dijanjikan saja tidak dipenuhi, justru dia mengambil legacy dari yang tidak dia janjikan, dan itu juga gagal.” (Rocky Gerung).

Pernyataan tersebut dikembangkan dengan menjabarkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan politik hukum yang diimplementasikan pada masa pemerintahan Jokowi. Pernyataan awal narasumber yang menyatakan pemerintahan Jokowi adalah kejahatan diperkuat dengan premis-premis spesifik dari kebijakan dan proyek yang dianggap gagal hubungan logis antar argumen ini

menjaga fokus utama tema pada wacana yang dibawakan. Selain itu, penggunaan pengulangan istilah tertentu membantu menciptakan koherensi antar segmen diskusi. Dalam kutipan tersebut juga terdapat kata yang diulang “kejahatan” dan “janji” pengulangan ini menegaskan kritik terhadap kebijakan Jokowi yang dianggap anti demokrasi, melalui pengulangan tersebut menjadikan argumen lebih terstruktur dan saling mendukung antar bagian.

3) Kata Ganti

Kata ganti adalah alat yang dipakai komunikator untuk menunjukkan posisi seseorang dalam wacana. Tayangan *podcast* menggunakan kata ganti yang beragam, namun didominasi oleh kata ganti orang pertama dan orang ketiga tunggal yang digunakan oleh narasumber dan pembawa acara untuk mengekspresikan pandangan pribadi dan menciptakan gaya percakapan yang santai dan informal.

Data (10), menit 16:40-17:08

“Oke gue ingat waktu pertama kali lu ke sini lu tuh eh sempat mention juga soal dinasti politik ya kita ngobrol banyak dan salah satu lu sempat membela AHY dan Demokrat nih dan juga SBY gitu tapi nyatanya sekarang kalau kita lihat partai-partai ya sekarang atau sebelum Pemilu ramai-ramai mendukung apa yang lu sebut sebagai kejahatan Jokowi tadi termasuk juga Demokrat.” (Stefanus Pramono),

“Benar yes itu gua membela dengan maksud supaya mereka enggak nyemplung ke dinastinya Jokowi.” (Rocky Gerung).

Narasumber dan pembawa acara menggunakan kata *gue* dan *lu*, yang memberikan kesan informal dalam diskusi. Kata ganti orang pertama jamak “kita” juga digunakan untuk menyatakan pandangan kolektif dan persefektif bersama, seperti dalam kutipan berikut.

Data (11), menit 07:17-07:46

“Begitulah kondisi kita kan jadi dipukau oleh tadi lembaga survei elektabilitasnya 84 likeability 82% tuh tapi kita enggak ngerti apa yang terjadi di barik lembaga survei itu kalau kita lihat bahwa semua hal bahkan semua jurnalis yang paling kecil pun itu tahu kejatan Jokowi netizen itu caci maki jadi seolah-olah ada ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia tu, nah gua lebih percaya pada batin.” (Rocky Gerung).

Kata ganti *kita* menunjukkan narasi kolektif, mengajak penonton untuk merasakan pengalaman bersama dan menciptakan kesan solidaritas dalam kritik terhadap lembaga survei dan pemerintahan Jokowi. Sementara kata ganti orang ketiga tunggal “*dia*” digunakan untuk merujuk pada subjek diskusi utama yaitu Presiden Jokowi dalam konteks kritik atau evaluasi.

Data (12), menit 13:34-13:43

“Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage apa namanya, sampah politik dari Jokowi kan.” (Rocky Gerung).

Kata ganti *dia* merujuk pada Jokowi dalam konteks evaluasi negatif, memperkuat konstruksi narasi yang menggambarkan Jokowi sebagai beban bagi penerusnya. Kata ganti orang ketiga “*mereka*” juga digunakan untuk merujuk pada pihak-pihak tertentu seperti politisi, lembaga survei, atau kelompok yang lebih luas.

Data (13), menit 06:27-06:47

“Memang telanjang, tapi ketelanjangan itu kan mestinya peka terhadap mereka yang menyaksikan itu sama dengan cerita Hans Christin Anderson tentang seorang raja yang dipoles sedemikian rupa sehingga dia enggak ngerti lagi bahwa sebetulnya dia lagi teranjang tapi oleh punggawa-punggawa dia

punggawa itu artinya lembaga survei.” (Rocky Gerung).

Kata ganti *mereka* dan *punggawa* digunakan untuk menggambarkan pihak-pihak yang dianggap berkontribusi pada persepsi manipulatif terhadap citra Jokowi, dalam konteks evaluasi.

Stilistik

Elemen stilistika terdiri dari leksikon, merupakan elemen yang menganalisis bagaimana komunikator menggunakan kata dari berbagai kosakata yang ada. Kata yang digunakan komunikator dapat merepresentasikan ideologinya terhadap suatu fakta atau realitas. Berikut merupakan kutipan dari wacana yang menggambarkan penggunaan leksikon dalam *podcast*.

Data (14), menit ke 02:37-02:48

“Kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Itu karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan gua ucapin itu secara serius ya” (Rocky Gerung).

Data (15), menit 13:34-13:55

“Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia dia masih bawa baggage apa namanya sampah politik dari Jokowi kan kira-kira begitu ya Gibran, Kaesang, Bobi ya sampah politik Jokowi bukan gue ngomongin itu kan pikiran berkali-kali tempo justru pamerkan itu sampah.” (Rocky Gerung)

Kutipan di atas menggambarkan pandangan narasumber terhadap pemerintahan Jokowi dengan menggunakan kosakata *puncak kejahatan* dan *sampah politik* untuk mengutarakan kritiknya.

Retorika

Retoris merupakan struktur mikro yang menganalisis tiga elemen yaitu grafis, metafora, dan ekspresi. Tujuan analisis struktur ini adalah untuk mengetahui

bagaimana dan dengan cara apa penekanan dalam wacana dilakukan.

1) Grafis

Elemen grafis merupakan elemen yang menganalisis penggunaan grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti penting suatu wacana. Dalam tayangan *Podcast* menggunakan elemen grafis berikut.

Gamabr 1. Elemen Grafis, Podcast Bocor Alus Politik Tempo.co



Data (16)

Berdasarkan gambar di atas, elemen grafis dapat dianalisis berdasarkan penggunaan teks, tipografi, dan Visual gambar. *Pertama*, analisis penggunaan teks dan tipografi terdapat pada judul utama “DOSA 10 TAHUN PEMERINTAH JOKOWI” yang ditulis menggunakan huruf kapital tebal berwarna putih. Frasa “DOSA 10 TAHUN” dan kata “JOKOWI” menggunakan huruf yang lebih tebal untuk memberikan penekanan dan mengarahkan fokus penonton pada topik wacana utama yaitu evaluasi kritis terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial pada masa pemerintahan Jokowi. Selain itu, terdapat *subjudul* dan gambar “Eksklusif Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi” menggunakan font lebih kecil. Hal ini mencerminkan bahwa wacana dalam video *podcast* tersebut hadir sebagai episode khusus yang mendalami laporan dari majalah *Tempo* edisi khusus terkait 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Kedua, penggunaan visual dan ilustrasi bergambar memegang peranan penting dalam penekanan wacana. Sosok Rocky Gerung sebagai narasumber utama dalam *podcast* ditampilkan di tengah dengan gestur menunjuk kepala dan ekspresi yang serius. Gestur tersebut menonjolkan kesannya sebagai figur intelektual yang kritis dalam menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Sementara itu, terdapat ilustrasi gambar latar Presiden Jokowi menampilkan pose santai dengan ekspresi tersenyum lebar dan tangan yang menutup telinga. Visual ini menciptakan kesan ketidakpedulian Presiden Jokowi terhadap kritik atau isu yang diangkat.

2) Metafora

Elemen metafora merupakan elemen yang menganalisis penggunaan kiasan, ungkapan, dan metafora untuk memperkuat pesan utama. Elemen metafora ini ditunjukkan pada kutipan berikut.

Data (17), menit 07:46-07:51

*“Aritnya lu enggak percaya dengan hasil survei tingkat kepuasan 70% itu?(Stefanus Pramono),
“Oh gua percaya 70%, bohongnya!”(Rocky Gerung).*

Narasumber menggunakan pernyataan yang bermakna kebalikan dari pertanyaan pembawa acara dengan menjawab “percaya, 70%, bohongnya”, pernyataan tersebut merupakan metafora ironi. Majas ironi merupakan majas yang menonjolkan ketidaksesuaian antara realitas dan klaim yang sering digunakan dalam wacana.

Data (18), menit 02:37-02:48

“Kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu karena Jokowi Adalah puncak

dari kejahatan gua ucapin itu secara serius ya.” (Rocky Gerung).

Pernyataan di atas mengandung majas hiperbola yang menggambarkan pemerintahan Jokowi sebagai puncak dari segala kejahatan di era reformasi. Pernyataan ini mengundang perhatian pembawa acara untuk memantik diskusi dan mempertanyakan lebih dalam akurasi klaim tersebut. Menurut Desai et al. (2021) metafora hiperbolis dapat menguatkan emosi pendengar dan menciptakan gambaran mental yang ekstrem.

Data (19), menit 22:38-22:56

“Jokowi punya banyak kartu untuk dia bujuk ke masyarakat kan. BLT di kantong kiri kanan, ini kantong sprindik ini kantong janji kan BLT apa, Kartu Indonesia Pintar, dan segala macam itu satu kartu yang dia enggak mau bagikan dia mau pakai sendiri itu.” (Rocky Gerung).

Apa itu? (Husein Abri)

Kartu Indonesia dungu! (Rocky Gerung).

Penggalan kutipan di atas merupakan sebuah metafora sarkasme yang merepresentasikan seorang tokoh dengan nada sinis. Sarkasme dapat menciptakan dampak emosional yang kuat untuk mengekspresikan kritik dengan tajam (Musolff, 2017).

Data (20), menit 06:09-06:47

“Salah satu ya Bang salah satu yang kemudian ada di apa ya di termin akhir begitu ya pemerintahan Jokowi itu adalah bagaimana dia membangun dinasti, yang sudah secara telanjang gitu ya, Abang melihat ini gimana sih?” (Raymundus Rikang)

“Ketelanjangan itu kan mestinya peka terhadap mereka yang menyaksikan kan, itu sama dengan cerita Hans Christin Anderson tentang seorang raja yang dipoles sedemikian rupa sehingga dia enggak ngerti lagi bahwa sebetulnya dia lagi teranjang tapi oleh

punggawa-punggawa dia, punggawa itu artinya lembaga survei.” (Rocky Gerung)

Penggunaan metafora majas Alusio dalam kutipan di atas digunakan untuk membandingkan situasi pemerintahan Jokowi dengan memberi daya tarik penonton melalui analogi yang dapat memperkaya teks dengan makna intertekstual.

3) Ekspresi

Elemen terakhir dalam analisis retorik adalah ekspresi. Penggunaan ekspresi dalam *Podcast* dibawakan dengan santai dengan pembahasan yang serius. Ekspresi tersebut dapat dilihat dari penggunaan humor dalam diskusi yang memberikan suasana yang santai dengan pembahasan yang serius.

Dimensi Kognisi Sosial

Analisis wacana kritis Van Dijk sering disebut pendekatan kognisi sosial, yang memfokuskan analisis tidak hanya pada struktur teks saja, namun juga memperhatikan kognisi yang mempengaruhi proses produksi wacana. Model pendekatan ini menganalisis representasi dari pengetahuan, opini dan sikap serta ideologi wartawan atau komunikator dalam memandang suatu peristiwa atau gambaran tokoh (Jannah, 2023). Representasi tersebut dapat dipahami dan dimengerti didasarkan pada skema yang menggambarkan bagaimana pembawa acara dan narasumber menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori dan bagaimana informasi tersebut diintegrasikan pada wacana yang menggambarkan bagaimana peristiwa tersebut dipahami, ditafsirkan, dan dimasukkan sebagai bagian dari pengetahuan tentang suatu realitas.

Pada tayangan *Podcast*, kognisi sosial dapat dianalisis melalui skema peran (*role schema*) dan skema peristiwa (*event schema*). Skema peran berkaitan dengan

cara seseorang memandang dan menggambarkan peran atau posisi individu dalam masyarakat. Skema ini terlihat melalui kutipan berikut.

Data (21), menit 04:16-04:38

“Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tu saya sebutnya kejahatan karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu dan itu yang menyebabkan defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang, tu ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebetulnya di situ kan.” (Rocky Gerung).

Melalui kutipan di atas, Rocky Gerung sebagai narasumber mengonstruksi pengetahuannya mengenai kebijakan politik hukum pemerintahan Jokowi yang memberikan dampak negatif pada berbagai aspek keutuhan negara seperti melemahnya peran hukum, dinasti politik, kerusakan lingkungan, meningkatnya ketegangan sosial, dan melemahnya demokrasi. Selanjutnya yaitu penggambaran konstruksi melalui pemahaman mengenai suatu peristiwa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Skema peristiwa terlihat melalui kutipan berikut.

Data (22), menit 05:45-06:09

“Artinya Prabowo sedang akan mengendarai, dia akan mengendarai bajai warisan Jokowi?” (Stefanus Pramono),

“Bajai warisan Jokowi mau disebut jalan tol lain kalau Lamborghini di situ tuh tuh jadi poin kita selalu melihat kapasitas negeri ini untuk ditumbuhkan kembali secara rasional karena selama pemerintahan Jokowi itu irasionalitas semua itu.”(Rocky Gerung).

Melalui kutipan di atas, narasumber menggunakan analogi untuk menggambarkan pengalaman dari pengetahuannya mengenai kebijakan-

kebijakan politik hukum era Jokowi sebagai suatu sistem yang irasional dengan menggunakan analogi *bajai* sebagai simbol ketidakefisienan dan ketidakmampuan dalam sistem pemerintahannya.

Dimensi Konteks Sosial

Menurut Van Dijk (2008), wacana yang dihadirkan di media massa merupakan cerminan dinamika sosial di masyarakat, karena seorang wartawan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri dengan membedah bagaimana wacana diproduksi dan dikonstruksi dengan menganalisis elemen kuasa (*power*) dan akses (*access*).

Kuasa dalam analisis wacana Van Dijk adalah kepemilikan atau dominasi yang dimiliki suatu kelompok untuk mengontrol kelompok lain secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan.

. *Podcast Bocor Alus Politik Tempo.co* memiliki kebebasan dalam mengontrol dan memproduksi wacana di masyarakat melalui penayangan video di kanal YouTube *Tempodotco* yang memiliki 1,35 juta *subscriber*. Melalui tayangan episode *Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi: Dinasti Politik dan Warisan Beban untuk Prabowo*, yang telah ditonton lebih dari 3,5 juta kali, menunjukkan bagaimana *Tempo.co* secara persuasif dapat mempengaruhi opini publik dengan menyajikan pandangan kritis Rocky Gerung terhadap kebijakan politik hukum pemerintahan Jokowi.

Akses merupakan elemen kedua dalam konteks sosial yang menganalisis bagaimana media dapat mempengaruhi opini publik dengan akses terhadap media. *Tempo.co* memanfaatkan platform YouTube untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses laporan tertulis *Majalah Tempo Edisi Khusus 10*

Tahun Jokowi dengan menyajikan tayangan audio visual yang membahas majalah tersebut dengan menghadirkan diskusi mendalam dari sudut pandang Roky Gerung, seorang pengamat politik yang berpengaruh di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana program Podcast *Bocor Alus Politik* oleh *Tempo.co* mengonstruksi realitas politik hukum Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk.

Berdasarkan hasil analisis tayangan YouTube berjudul *Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi: Dinasti Politik dan Warisan Beban untuk Prabowo Subianto*, peneliti menemukan konstruksi realitas politik hukum Indonesia yang direpresentasikan melalui tiga dimensi wacana. Pada dimensi teks, dengan menganalisis struktur mikro, suprastruktur dan struktur makro menunjukkan bahwa tayangan *podcast* menyoroti politik hukum Indonesia dengan membangun narasi kritis dengan menekankan kritik terhadap kepemimpinan 10 tahun Jokowi. Dimensi kognisi sosial merepresentasikan skema peran yang menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang gagal memenuhi prinsip demokrasi. Dimensi konteks sosial memperlihatkan peran media digital sebagai agen strategis yang memengaruhi opini publik dan memberikan ruang diskusi kritis terkait kebijakan politik hukum.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen penting dalam membentuk opini publik dan konstruksi realitas. Media digital seperti YouTube memiliki potensi besar untuk menjadi platform diskusi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat, terutama dalam membahas isu sosial, politik dan hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan data konten yang digunakan. Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan untuk mengkaji episode *podcast* lainnya dengan tema yang sama untuk mengetahui pola konstruksi realitas yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, T. N., Remanu, A. J. K., Farroza, K. S., & Pratiwi, A. (2024). The Analysis of Tempo Media Criticism of the Two Periods of Jokowi's Government (2014-2024): Nawadosa Jokowi Magazine. *ARRUS Journal of Sicial Sciences and Humsntities*, 4(6), 668-678.
- Aridho, A., Situmeang, T. A., Tinambunan, D. R., Ramadhani, K. N., Lase, M. W., & Ivanna, J. (2024). Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 206–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693>
- Arkana, J., & Firdaus, S. U. (2022). Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3), 521–529. <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.175>
- Asnan, M. (2018). KONSTRUKSI REALITAS POLITIK PEMBERITAAN KASUS RATU ATUT CHOSIYAH MENURUT METROTVNEWS.COM. *e-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*.
- CNN Indonesia. (2024, Oktober 4). Survei Indikator: 74,96 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241004143812-32-1151558/survei-indikator-7496-persen-publik-puas-dengan-kinerja-jokowi>
- Desai, S., McLean, J., Lawrence, C., & Filik, R. (2021). The impact of hyperbole on perception of victim testimony. *Journal of Pragmatics*, 174, 143–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.01.013>
- Dony Irawan, A., & Prasetyo, B. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>
- Eriyanto. (2005). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (IV). LKiS.
- Eriyanto. (2005). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.
- Evanalia, S. (2022). Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 32–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.86>
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Jannah, A. F. (2023). KOGNISI SOSIAL SANTRIKEREN. ID DALAM KANAL KONTRA NARASI RADIKALISME DAN TERORISME; PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS MODEL VAN DIJK. *Senapastra (Prosiding Seminar Nasioal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 1, 145–153.
- Jayanti, K. D., & Pribadi, F. (2024). Wacana Berpendapat Rocky Gerung dalam Program Perempuan Bicara

- TvOne: Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk. *Paradigma*, 13(1), 81–90. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/59643>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Kurniansyah, R. A., & Siregar, R. K. (2023). Critical Discourse Analysis on the Podcast “Putusan MK: Palu Hakim Patah Berkeping. *LITERATUS*, 5(2), 316–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1404>
- Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Kencana.
- Musolff, A. (2017). Metaphor, irony and sarcasm in public discourse. *Journal of Pragmatics*, 109, 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2016.12.010>
- Noak, P. A. (2023). Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(3), 596–612.
- Pitaloka, H. A. (2024). Strategi tutur pejabat negara dalam wawancara YouTube perspektif analisis wacana kritis. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 20(1), 151–165.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Rahman, G., & Nurhadi, J. (2024). Konstruksi Isu Dinasti Politik Jokowi dalam Tayangan Youtube Opini Tempo: Analisis Wacana Kritis. *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 8(1), 1–19.
- Sugiono, S. (2020). Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 47–66.
- Susanto, T. A. (2023). Podcast ‘Bocor Alus Politik Tempo’: Podcast Tempo Versus Erick Thohir. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(2), 110–119.
- Tempo.co. (2024). Mengapa Kami Membuat Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi. <https://www.tempo.co/arsip/edisi-khusus-10-tahun-jokowi-24601>
- Tempodotco. (2024, Juli 27). Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi: Dinasti Politik dan Warisan Beban untuk Prabowo Subianto. Tempo.co. <https://youtu.be/xj3PgZ4ldAk?si=OVwQWQakhkf4W33h>
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Van Dijk, T. A. (2014). *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*. Cambridge University Press.
- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Sainika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.102>
- Yandi, Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidayat, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 35–48.